

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Standar Akuntansi

Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, maupun hal lainnya yang oleh badan penyusun sengaja dipilih dan diberlakukan pada suatu lingkungan tertentu (pada umumnya negara) berdasarkan kerangka konseptual untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan (Suwardjono, 2014). Standar akuntansi ini akan menjadi pedoman utama dalam memperlakukan objek, elemen, dan pos pelaporan tertentu, serta standar ini akan dimuat ke dalam dokumen resmi.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan penyusun standar akuntansi di Indonesia. Standar tersebut diberi nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK ini menjadi pedoman bagi perusahaan di Indonesia dalam menjalankan praktik akuntansi. Di dalam PSAK 1 dijelaskan bahwa standar akuntansi mengatur mengenai pernyataan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi secara spesifik serta peristiwa lainnya.

Perkembangan akuntansi di Indonesia dimulai pada tahun 1973. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Panitia Penghimpun Bahan-Bahan dan Struktur GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) dan GAAS (*Generally Accepted Auditing Standards*). Kemudian pada tahun 1974, IAI membentuk

Komite Prinsip Akuntansi Indonesia yang mengesahkan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang berpedoman pada US GAAP. Akan tetapi, pada tahun 1994, dilakukan revisi besar-besaran oleh Ikatan Akuntan Indonesia. PAI diubah menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang tidak lagi berpedoman pada US GAAP, tetapi mengacu pada standar akuntansi keuangan internasional.

Berdasarkan kesepakatan antar anggota G20 pada tahun 2009, dilakukan konvergensi ke *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Tahap pertama dilakukan pada tahun 2012, kemudian dilanjutkan tahap kedua di tahun 2013 dan 2014. Hingga saat ini IAI masih melakukan konvergensi dari SAK ke IFRS. Salah satu hasil konvergensi IAI terhadap IFRS adalah dengan lahirnya PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang merupakan adopsi dari IFRS 15: *Revenue from Contracts with Customers*.

2.2 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah komponen yang sangat penting yang digunakan perusahaan ketika menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi elemen-elemen yang menentukan profit yang diperoleh perusahaan dalam satu siklus akuntansi. Sebagai organisasi yang mempunyai orientasi pada profit, pendapatan merupakan faktor yang penting bagi keberlangsungan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat pendapatan yang baik akan mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut.

Menurut Kieso *et al.* (2018), pendapatan merupakan arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi selama satu periode yang timbul dari aktivitas suatu entitas ketika arus kas masuk tersebut menghasilkan kenaikan ekuitas selain dari

kontribusi pemegang saham. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014), pendapatan merupakan penghasilan dari kegiatan perusahaan yang biasanya berasal dari penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan arus kas masuk bruto yang berasal dari aktivitas normal perusahaan seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa yang akan menambah ekuitas perusahaan. Pendapatan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan operasional

Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan. Pendapatan ini dapat dihasilkan dari kegiatan penjualan barang yang diproduksi perusahaan serta layanan jasa yang merupakan kegiatan utama perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Pendapatan ini akan terus terjadi secara berulang-ulang dalam setiap periode.

2. Pendapatan nonoperasional

Pendapatan nonoperasional merupakan pendapatan yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan. Pendapatan ini berasal dari pemanfaatan aktiva atau sumber ekonomi oleh pihak luar dan penjualan aktiva yang bukan berasal dari hasil produksi.

2.3 PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 72 adalah standar akuntansi terbaru yang menjelaskan tentang pendapatan kontrak dengan konsumen yang menggantikan standar yang berlaku sebelumnya. Standar yang

digantikan oleh PSAK 72 ini antara lain PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi, PSAK 23 tentang Pendapatan, PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat, ISAK 21 tentang Perjanjian Kontrak Kontruksi Real Estat, ISAK 27 tentang Pengalihan Aset dari Pelanggan, dan ISAK 10 tentang Program Loyalitas Pelanggan. PSAK ini mulai berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2020 tetapi opsi pemberlakuan dini tetap diperbolehkan.

Menurut PSAK 72 alinea ke-10, kontrak merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam membentuk hak maupun kewajiban yang dapat dipaksakan. Kemampuan memaksakan antara hak dan kewajiban ini merupakan suatu permasalahan hukum sehingga praktik dan proses dalam penentuan kontrak yang dilakukan harus berdasarkan yurisdiksi hukum yang berlaku. Kontrak bisa dilakukan dalam bentuk tulisan, lisan, maupun tersirat dalam praktik bisnis suatu perusahaan. Perusahaan harus dapat mempertimbangkan praktik maupun proses tersebut sehingga mampu menilai kapan perjanjian dengan pelanggan tersebut menciptakan hak maupun kewajiban yang dapat dipaksakan.

Pelanggan menurut PSAK 72 merupakan pihak yang membayarkan imbalan kepada perusahaan untuk mendapatkan barang maupun jasa yang merupakan hasil dari kegiatan usaha perusahaan tersebut. Pihak lain dalam kontrak tidak termasuk kategori pelanggan apabila pihak tersebut memiliki kontrak dengan perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha di mana pihak-pihak tersebut berbagi risiko. maupun manfaat dari aktivitas perusahaan (seperti kolaborasi pengembangan aset).

Berbeda dari standar sebelumnya yang menerapkan pendekatan *rules-based*, PSAK 72 ini menerapkan pendekatan *principal-based*. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tujuan dari IFRS yaitu meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, serta keterbandingan laporan keuangan antar perusahaan secara global. Berdasarkan PSAK 72, hal yang perlu diperhatikan dalam mencatat pendapatan perusahaan adalah ketika kewajiban entitas untuk menyerahkan barang/jasa telah selesai dilakukan. Terdapat lima tahapan pengakuan pendapatan yang harus dipenuhi perusahaan yang dalam IFRS 15 biasa disebut *Five Steps Model*. Lima tahapan tersebut adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi, serta mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan terpenuhi.

2.3.1 Pengakuan Pendapatan

Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pencatatan transaksi-transaksi dalam satu periode yang melibatkan akun-akun terkait dan ada dalam laporan keuangan. Menurut Biswan dan Mahrus (2019), pengakuan pendapatan bertujuan untuk menunjukkan adanya perpindahan barang ataupun jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang menginterpretasikan imbalan yang diterima dalam proses pertukaran barang dan jasa. Adapun kriteria pengakuan pendapatan ialah ketika terdapat kemungkinan besar bahwa ada manfaat ekonomi yang akan diterima dimasa yang akan datang sehubungan dengan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban serta memiliki nilai yang dapat diukur secara andal.

Saat perusahaan akan mengakui pendapatan, hal yang perlu diperhatikan adalah proses pengakuan pendapatannya, karena setiap perusahaan mempunyai jenis produk dan jasa yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kontrak adalah bagian yang penting dalam pengakuan pendapatan. Pendapatan tidak dapat diakui sampai adanya kontrak antara pihak yang berkepentingan, Oleh karena itu, Langkah pertama yang dilakukan perusahaan sebelum melakukan pengakuan pendapatan adalah dengan mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Tidak semua kontrak dapat dijadikan acuan dalam pengakuan pendapatan sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 72. Perusahaan diperkenankan mengakui pendapatan ketika kontrak memenuhi kriteria sesuai yang dijelaskan dalam paragraf 9 PSAK 72, yaitu:

- a. Seluruh pihak telah setuju serta berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing yang terdapat dalam kontrak.
- b. Perusahaan mampu mengidentifikasi hak setiap pihak yang berkaitan dengan barang atau jasa yang akan ditransfer.
- c. Perusahaan mampu mengidentifikasi jangka waktu terkait pembayaran barang atau jasa yang akan ditransfer.
- d. Adanya substansi komersial.
- e. Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang telah diberikan.

Apabila kontrak tidak memenuhi ketentuan tersebut dan perusahaan sudah menerima pembayaran dari pelanggan, maka imbalan tersebut akan diakui menjadi pendapatan apabila memenuhi salah satu dari dua kriteria berikut.

Pertama, entitas tidak mempunyai sisa kewajiban untuk memberikan barang atau jasa kepada pelanggan dan seluruh imbalan yang dijanjikan pelanggan telah diterima entitas serta tidak dapat dikembalikan. Kedua, kontrak telah diakhiri dan imbalan yang diterima entitas tidak dapat dikembalikan. Apabila salah satu dari dua syarat tersebut belum terpenuhi, maka perusahaan akan mencatat imbalan sebagai liabilitas.

Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) sendiri merupakan perjanjian yang ada kontrak terkait penyediaan jasa atau barang tertentu kepada konsumen. Untuk dapat menentukan jumlah kewajiban dalam suatu kontrak, perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap barang atau jasa yang tertera dalam kontrak. Perusahaan harus dapat menilai kewajiban yang ada dalam kontrak, apakah saling bergantung atau saling terpisah. Apabila kewajiban bersifat *independent* dan dapat dijual secara terpisah, maka kewajiban kontrak disebut sebagai kewajiban terpisah (*separate obligation*). Sebaliknya, apabila kewajiban kontrak saling terkait, saling bergantung satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan, maka kontrak tersebut dilaporkan sebagai satu kewajiban pekerjaan (*one performance obligation*).

2.3.2 Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan dilakukan berdasarkan imbalan yang akan diterima entitas. Menurut PSAK 23, pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar imbalan yang akan diterima perusahaan. Nilai wajar sendiri merupakan harga yang akan diterima ketika menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk

mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur pada tanggal pengukuran antara pelaku pasar.

Pengakuan pendapatan dilakukan setelah kewajiban perusahaan telah terselesaikan. Perusahaan melakukan pengakuan pendapatan dengan mengukur pendapatan tersebut. Tahapan yang dilakukan perusahaan adalah dengan menentukan harga transaksi kemudian mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pekerjaan. Pengakuan dan pengukuran pendapatan merupakan dua hal yang saling berhubungan satu dengan yang lain.

Langkah pertama dalam mengukur pendapatan adalah dengan menentukan harga transaksi. Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan saat menentukan harga transaksi. Harga transaksi meliputi total imbalan yang diperkirakan akan menjadi milik perusahaan, tetapi jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga tidak dimasukkan. Pertimbangan perusahaan dalam menentukan harga transaksi yaitu:

- a. Imbalan yang diberikan berupa imbalan variabel, imbalan tetap, atau kombinasi keduanya. Jika imbalan yang diberikan berupa imbalan variabel, maka perusahaan harus mengestimasi jumlah imbalan variabel yang dijanjikan dalam kontrak. Jumlah imbalan bisa bervariasi, misalnya berupa diskon, insentif, denda, dan lain-lain.
- b. Estimasi pembatas imbalan variabel.
- c. Jika terdapat komponen pembiayaan yang signifikan dalam kontrak, maka perusahaan harus menyesuaikan jumlah imbalan dengan *time value of money*,

kecuali jika perusahaan dapat memperkirakan bahwa periode pengalihan barang atau jasa dan pembayaran dari pelanggan tidak lebih dari satu tahun.

- d. Imbalan yang dijanjikan pelanggan berupa non-kas, maka perusahaan akan mengukur imbalan tersebut berdasarkan nilai wajar. Namun apabila nilai wajar imbalan kepada perusahaan tidak dapat diestimasi secara andal, maka perusahaan dapat mengukur *menggunakan stand-alone selling price*.
- e. Utang imbalan pada pelanggan akan mengurangi harga transaksi. Utang imbalan pada pelanggan merupakan jumlah kas yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pelanggan.

Setelah menentukan harga transaksi, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan harga transaksi tersebut ke setiap kewajiban pelaksanaan. Perusahaan mengalokasikan harga transaksi dengan tujuan agar alokasi harga transaksi tersebut benar-benar menggambarkan jumlah imbalan yang diterima entitas. Perusahaan dapat mengalokasikan harganya berdasarkan *stand-alone selling price* atau harga jual berdiri sendiri yang didasarkan pada *fair value*. Harga jual tersebut ditentukan di awal kontrak pada barang atau jasa secara proporsional. Apabila *fair value* barang atau jasa tidak dapat diperkirakan, maka dapat dilakukan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan (*Adjusted market assessment approach*), yaitu perusahaan menggunakan acuan pasar tempat barang atau jasa diperjualbelikan dan juga harga yang rela dikeluarkan oleh pelanggan. Perusahaan juga dapat melakukan perbandingan harga dari kompetitor kemudian disesuaikan dengan biaya serta margin perusahaan.

- b. Pendekatan biaya ekspektasian ditambah margin (*expected cost plus a margin approach*), yaitu dengan memprediksi biaya yang diharapkan terjadi dalam memenuhi kewajiban pekerjaan serta menambah margin atas penjualan barang atau jasa tersebut.
- c. Pendekatan residual (*residual approach*), merupakan pilihan terakhir, karena akan dipakai jika harga jual dari barang atau jasa tidak dapat ditemukan, dikarenakan adanya perubahan harga barang atau jasa yang tidak menentu. Perusahaan dapat merujuk pada total harga transaksi, kemudian dikurangi dengan harga jual barang atau jasa lain yang dapat ditelusuri pada barang atau jasa yang tercantum dalam kontrak.

2.3.3 Penyajian Pendapatan

Langkah terakhir dalam *Five Steps Model* adalah mengakui pendapatan. Ketika salah satu dari pihak yang bertransaksi dalam kontrak melaksanakan seluruh kewajibannya, maka kontrak akan disajikan perusahaan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak maupun liabilitas kontrak, tergantung pada hubungan antara kinerja perusahaan atau pembayaran pelanggan.

Apabila perusahaan memberikan barang atau jasa kepada pelanggan sebelum pelanggan membayarkan imbalan atau sebelum pembayaran jatuh tempo, maka kontrak tersebut akan disajikan sebagai aset kontrak, namun tidak termasuk jumlah yang disajikan sebagai piutang. Aset kontrak merupakan hak imbalan dalam pertukaran barang atau jasa yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Secara umum, perusahaan memiliki dua hak dalam kontrak yaitu hak bersyarat (*conditional rights*) dan hak tanpa syarat (*unconditional rights*). Perusahaan

menyajikan hak tanpa syarat sebagai piutang dalam laporan posisi keuangan, sedangkan hak bersyarat dilaporkan terpisah pada laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak.

Sementara itu, liabilitas kontrak merupakan kewajiban entitas untuk memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Kontrak akan tersaji sebagai liabilitas kontrak apabila pembayaran dilakukan lebih awal atau pembayaran telah jatuh tempo sebelum perusahaan memberikan barang atau jasa. Akun yang digunakan untuk mencatat kewajiban kontrak contohnya *unearned sales revenue*, *unearned service revenue*, dan akun lainnya yang serupa.

2.3.4 Pengungkapan Pendapatan

Selain menyajikan pendapatan, perusahaan juga harus melakukan pengungkapan pendapatan. Tujuan dari pengungkapan adalah untuk memberikan informasi yang cukup serta untuk mempermudah pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, serta ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif atas hal sebagai berikut:

- a. Kontrak dengan pelanggan, meliputi pemisahan pendapatan, saldo kontrak, kewajiban pelaksanaan, dan harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan.
- b. Pertimbangan yang signifikan beserta perubahan yang dibuat dalam hal penerapan pernyataan pada suatu kontrak, meliputi penetapan waktu

penyelesaian kewajiban pelaksanaan, harga transaksi, dan jumlah yang dialokasikan.

- c. Aset yang diakui dan diidentifikasi melalui biaya yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak.

2.4 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dalam konteks dunia usaha memiliki pengertian yang sangat luas. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016), kinerja keuangan merupakan kemampuan suatu entitas dalam mengelola dalam mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Sedangkan menurut Irhan Fahmi (2011) kinerja keuangan adalah gambaran dari pencapaian keberhasilan suatu perusahaan yang dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas aktivitas yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar.

Kinerja mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola usahanya. Selain itu, kinerja keuangan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan yang nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.

Salah satu alat analisis yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang dilakukan dengan menghubungkan perkiraan-perkiraan yang ada dalam laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Analisis ini dilakukan perusahaan untuk

menilai kinerja keuangan berdasarkan perbandingan pos-pos tertentu dalam neraca, laporan laba rugi, maupun laporan arus kas pada periode tertentu. Analisis rasio keuangan akan memberikan gambaran kepada manajer keuangan serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk mengevaluasi kondisi keuangan karena dengan adanya rasio ini, kondisi kesehatan perusahaan akan cepat diketahui.

Analisis rasio keuangan akan menggunakan data laporan keuangan yang sudah ada untuk dilakukan penilaian. Meskipun menggunakan data pada kondisi di masa lalu, namun analisis rasio keuangan dapat menilai risiko dan peluang pada masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lain. Kinerja perusahaan dalam satu periode akan dapat dinilai keefektifannya berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan tersebut.

Kinerja keuangan secara umum dapat diukur dengan beberapa rasio keuangan, antara lain yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Rasio yang digunakan juga akan mengukur seberapa besar dampak penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tiga jenis rasio tersebut adalah *Current Ratio*, *Total Debt to Total Assets Ratio*, dan *Net Profit Margin*.

1. Current Ratio

Menurut Kasmir (2016), rasio lancar atau *current ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk

melunasi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo. *Current ratio* dapat digunakan untuk mengukur tingkat keamanan perusahaan (*margin of safety*). Apabila nilai *current ratio* perusahaan menunjukkan nilai lebih dari 1, menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan baik dan aktiva lancar yang dimiliki mampu menutup seluruh utang jangka pendek yang jatuh tempo pada 12 bulan ke depan. Sebaliknya, jika *current ratio* menunjukkan nilai kurang dari 1, menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan kurang baik dan aktiva lancar belum bisa menutup seluruh utang jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan kedepan sehingga perlu mencari pendanaan untuk melunasi seluruh kewajiban lancar tersebut. Rumus untuk mencari current ratio yaitu:

$$\textbf{Current Ratio} = \frac{\textit{Current Assets}}{\textit{Current Liabilities}}$$

Current ratio dipilih dalam penelitian karena *current ratio* merupakan rasio yang paling umum untuk dapat menilai kesanggupan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Hal ini menunjukkan sejauh mana tuntutan kreditor jangka pendek dapat dipenuhi dengan aset yang kemungkinan besar adalah uang tunai pada periode saat utang tersebut jatuh tempo.

2. Total Debt to Total Assets Ratio

Menurut Kasmir (2016), *debt to assets ratio* adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan aset. *Debt to assets ratio* digunakan untuk membandingkan total utang yang dimiliki suatu perusahaan dengan total aktiva, atau dengan kata lain melihat seberapa besar ativa perusahaan tersebut didanai oleh utang. Rasio ini juga menunjukkan solvabilitas perusahaan yaitu dengan menunjukkan seberapa besar sumber daya perusahaan mampu untuk

melunasi seluruh kewajibannya. Apabila nilai *debt to assets ratio* tinggi, menunjukkan bahwa perolehan sebagian besar aset perusahaan adalah dari utang. Sebaliknya, apabila *debt to assets ratio* perusahaan rendah, menunjukkan bahwa sebagian perolehan aset adalah dari modal. *Debt to assets ratio* akan memberikan informasi kepada investor tentang struktur modal perusahaan sebelum melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Rumus untuk mencari *debt to assets ratio* yaitu:

$$\textbf{Total Debt to Assets Ratio} = \frac{\textit{Total Debt}}{\textit{Total Assets}}$$

Debt to assets ratio dipilih dalam penelitian karena menggambarkan total liabilitas dengan total aset. Hal ini akan menunjukkan apakah aset perusahaan cukup (*solvable*) atau tidak cukup (*insolvable*) untuk membayar semua kewajibannya.

3. Net Profit Margin

Menurut Brigham dan Houston (2013), *net profit margin* merupakan rasio yang mengukur besarnya laba bersih perusahaan dibandingkan dengan total penjualannya. *Net profit margin* akan mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Rumus untuk mencari *debt to assets ratio* yaitu:

$$\textbf{Net Profit Margin} = \frac{\textit{Net Income}}{\textit{Sales}}$$

Net profit margin dipilih dalam penelitian karena menggambarkan pertumbuhan laba perusahaan. Margin laba adalah indikator strategi pendapatan perusahaan dan seberapa baik pengelolaan biaya.

2.5 Penelitian Sebelumnya

Meskipun baru diterapkan efektif per 1 Januari 2020, beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui dampak dari penerapan PSAK 72 ini. Penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan acuan dalam membandingkan bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia menerapkan standar baru dalam pengakuan pendapatannya serta bagaimana dampaknya dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Penelitian dilakukan oleh Puspamurti dan Firmansyah (2020) yang berjudul “Penerapan PSAK 72 Terkait Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk”. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, *content analysis*, dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT Telkom tidak melakukan penerapan ini terhadap PSAK 72 melainkan menerapkan IFRS 15. Hal ini karena PT Telkom merupakan perusahaan yang terdaftar di bursa saham dalam maupun luar negeri. PT Telkom mengalami kendala dalam penerapan PSAK 72 dikarenakan sulit dalam menginterpretasi setiap kontrak dengan pelanggan. Selain itu, PT Telkom juga belum memiliki sistem yang terintegrasi dalam menginterpretasi kontrak dengan pelanggan. Karena proses kerja yang masih manual dan kendala dari sisi sumber daya manusia.

Selain itu, juga terdapat penelitian dilakukan oleh Anggraini (2018) yang berjudul “Studi Komparatif Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 23 dan ED PSAK 72 Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi”. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dianalisis

secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendapatan yang diperoleh dengan standar PSAK 72 lebih kecil daripada yang menggunakan PSAK 23. Hal tersebut dapat terjadi karena tersadap perbedaan yang mana pendapatan dapat diakui berdasarkan PSAK 23 namun tidak dapat diakui berdasarkan PSAK 72. Rasio profitabilitas secara umum juga mengalami penurunan semenjak diterapkan PSAK 72 ini. Sementara kinerja keuangan yang diukur dengan rasio lancar dan *debt to asset ratio* berbanding terbalik dengan rasio profitabilitas karena mengikuti liabilitas kontrak dari perusahaan.

Penelitian lain mengenai penerapan PSAK di bidang *real estate* juga dilakukan oleh Veronica *et al* (2019). Penelitian tersebut berjudul “Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018”. Metode yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dan teknik pengambilan *probability purposive sampling* terhadap tiga perusahaan real estat dengan laba bersih tertinggi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendapatan yang dicatat lebih kecil semenjak diterapkannya PSAK 72. Hal tersebut dikarenakan perusahaan belum dapat mengakui pendapatan atas kontrak jangka panjang sesuai ketentuan PSAK 72 sehingga nilai yang diakui menjadi lebih kecil dibandingkan dengan PSAK 44. Namun kinerja keuangan perusahaan tidak terlalu berpengaruh signifikan kecuali pada *net profit margin* perusahaan-perusahaan tersebut.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan perusahaan, khususnya di bidang telekomunikasi dan real estat

terkena dampak dari penerapan PSAK 72. Dampak tersebut adalah pendapatan yang diakui menjadi lebih kecil daripada ketika menggunakan standar sebelumnya sehingga kinerja keuangan perusahaan menjadi turun. Namun hal tersebut tidak terlalu berdampak signifikan terhadap perusahaan telekomunikasi dan real estat yang mayoritas pendapatannya merupakan pendapatan kontrak dengan pelanggan.